

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan salah satu kebijakan di Indonesia untuk mencapai tujuan yaitu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat secara adil, makmur dan merata. Arah dari kebijakan pembangunan nasional ini adalah untuk mewujudkan pembangunan daerah yang merata di setiap wilayah. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih kreatif dan mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan daerah, sehingga akan memacu tumbuh kembangnya kemampuan ekonomi untuk melaksanakan pembangunan ekonomi daerah.

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah, masyarakat dan pemerintah daerah harus bekerja sama dalam mengelola potensi wilayahnya, sehingga tujuan untuk menciptakan jenis lapangan kerja yang baru dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi wilayah dapat tercapai.² Masyarakat dan pemerintah daerah juga harus mampu mengidentifikasi potensi dari setiap sumber daya yang dibutuhkan untuk dijadikan rancangan pembangunan perekonomian kedepannya. Kemandirian daerah akan tercipta jika pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah berjalan dengan baik dan didukung oleh program pemerintah yang jelas.

Pemerintah mengeluarkan salah satu program dalam kebijakan pembangunan nasional yaitu berupa otonomi daerah. Otonomi daerah juga dapat memaksimalkan

² Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Ed. Ke-5, Cet.1, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), hal. 374

tujuan dari pembangunan daerah dengan memberikan kebebasan bagi pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Adanya otonomi daerah, diharapkan bahwa pemerintah daerah dapat lebih memberikan pelayanan publik secara efektif dan efisien. Dikarenakan pemerintah daerah dapat lebih memahami masyarakatnya terkait apa yang mereka butuhkan.

Kebijakan otonomi daerah ini sudah berjalan secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2001³. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, Otonomi daerah adalah wewenang masing-masing daerah untuk mengatur dan mengurus setiap kegiatan yang ada di wilayahnya berdasarkan aturan-aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan utama dalam menciptakan kesejahteraan dengan meningkatkan perekonomian.⁴ Otonomi daerah sendiri menganut asas desentralisasi yang merupakan pemberian wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk penciptaan kemandirian dan kreativitas daerah.

Demi terselenggaranya otonomi daerah secara optimal, maka telah ditetapkan dalam UU No. 33 Tahun 2004 yang berisi tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perimbangan keuangan ini dijadikan sebagai wujud dukungan pendanaan atas dilakukannya asas desentralisasi oleh pemerintah daerah. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 5, sumber penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain.⁵ Sejalan dengan tujuan otonomi daerah, maka suatu daerah harus mengoptimalkan besarnya Pendapatan Asli Daerahnya.

³ H.A.W Wijaya, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 7-8

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 33 tahun 2004 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diterima daerah dimana bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.⁶ Bagi daerah otonom, Pendapatan Asli Daerah dijadikan sebagai sumber keuangan terbesar, dimana PAD digunakan sebagai indikator untuk melihat kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Jadi dapat dikatakan bahwa semakin tinggi proporsi PAD terhadap penerimaan daerah maka semakin kecil pula ketergantungan daerah pada pemerintah pusat.

Banyak sedikitnya PAD yang diterima merupakan cerminan bagi keuangan daerah dan hasil dari bentuk pengalokasian keuangan pemerintah daerah dalam membiayai setiap kegiatan untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat.⁷ Akan tetapi dalam kenyataannya di Indonesia masih banyak PAD yang belum mampu membiayai semua pengeluaran pemerintah daerah, karena kontribusinya relatif sedikit dan masih banyak menggantungkan pada dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sehingga peluang adanya pertumbuhan ekonomi harus dimanfaatkan sebaik mungkin demi mendorong berkembangnya perekonomian.

Dengan hal ini, pemerintah daerah bukan berarti harus menambah pungutan pajak baru, melainkan pemerintah daerah harus pandai dalam menggali potensi daerah yang dimiliki secara optimal yang dapat dijadikan sebagai penerimaan daerah. Keselarasan antara pemerintah daerah dan masyarakat harus tetap terjaga dalam menetapkan kebijakan yang tepat dan dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang ada. Pemerintah daerah harus handal dalam mengidentifikasi

⁶ *Ibid.*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004

⁷ Baihaqi, "Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu", *Jurnal Akuntansi*, Vol.1, No. 3. 2011, hal. 248

sektor-sektor apa saja yang potensial sebagai motor penggerak pembangunan daerah⁸, sehingga potensi PAD yang diterima akan maksimal.

Pada realitanya, besar kecilnya potensi yang dimiliki daerah, tidak dapat selalu dijadikan sebagai jaminan untuk mendapatkan PAD yang tinggi. Hal ini kembali lagi pada bagaimana sinergi antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam mengelola sumber dayanya. Salah satunya adalah Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur terdiri dari 38 Kabupaten dan Kota yang mempunyai berbagai wilayah yang kaya akan potensi sumber daya alam, yang meliputi sektor industri, pertanian, perindustrian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, kelautan dan pariwisata. Dengan potensi tersebut wilayah Jawa Timur selalu mengalami kenaikan pada pendapatan asli daerahnya.

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur (dalam Triliun Rupiah)

Uraian	2014	2015	2016	2017
Pendapatan Asli Daerah	14,44	15,40	15,90	17,33

Sumber: Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur⁹

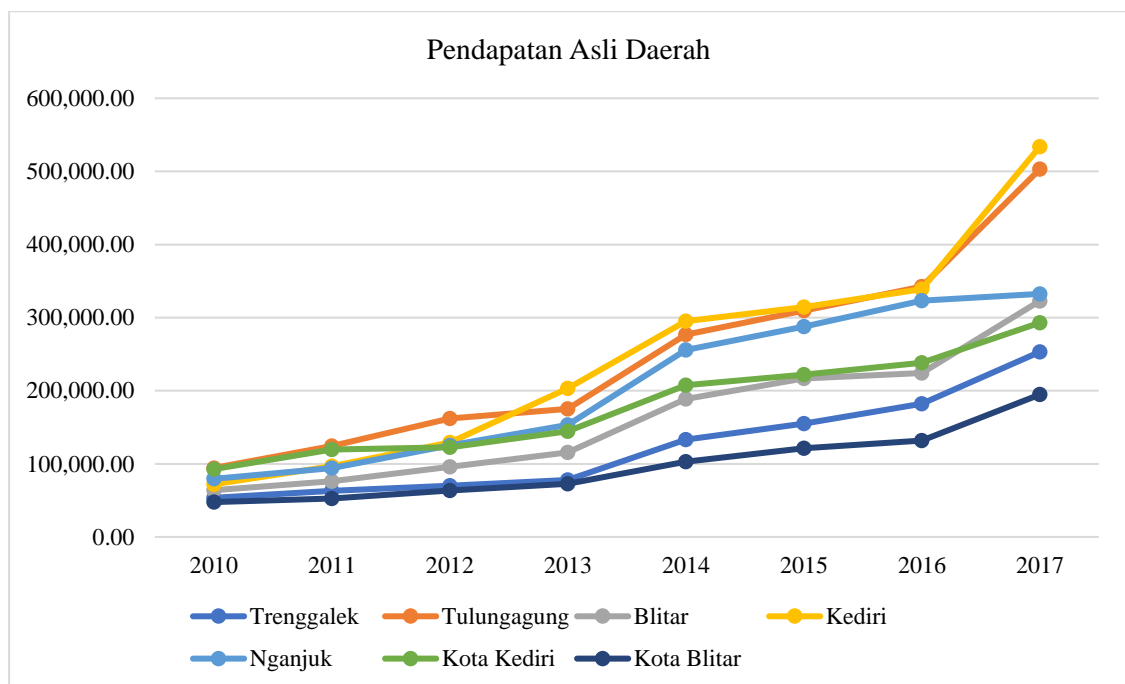
Dalam tabel 1.1 diatas, menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dengan semakin meningkatnya PAD mencerminkan kemampuan Provinsi Jawa Timur semakin mandiri untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya. Akan tetapi hal itu tidak berlaku untuk setiap Kabupaten/Kota, karena provinsi Jawa Timur belum mampu menyeimbangkan besarnya PAD yang diterima oleh setiap wilayah dari 38

⁸ Humaidi Mujab, *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Penduduk, Dana Alokasi Umum, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2014*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), hal. 4

⁹ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, *Data Dinamis Provinsi Jawa Timur Triwulan I – 2018*, (Surabaya: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, 2018), hal. 168

Kabupaten dan Kota. Tingkatan pertambahan PAD sangat berbeda-beda dari satu wilayah dengan wilayah lainnya. Salah satunya adalah wilayah yang berada di eks Karesidenan Kediri. Berikut gambar grafik pendapatan asli daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota se eks Karesidenan Kediri.

Gambar 1.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah 7 Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Kediri Tahun 2010-2017 (dalam Milyar Rupiah)



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, data diolah¹⁰

Berdasarkan gambar grafik 1.1, di atas menggambarkan bahwa dari tahun 2010 sampai tahun 2017 perolehan pendapatan asli daerah 7 Kabupaten/Kota se Eks Karesidenan Kediri terus menerus mengalami peningkatan meskipun kenaikannya fluktuatif. Grafik tersebut juga menunjukkan adanya perbedaan PAD yang diterima antar wilayah kabupaten/kota. Perolehan antar wilayah tersebut belum mencerminkan keseimbangan, masih terdapat wilayah yang pergerakan kenaikan

¹⁰ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, *Data Keuangan Daerah Mulai 2006*, dalam www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412, di akses 14 September 2018

PAD rendah yaitu Kota Blitar dan PAD tertinggi diperoleh oleh Kabupaten Kediri. Hal ini dapat mengakibatkan akan adanya dampak yang muncul bagi wilayah tersebut yaitu ketidakmerataan pembangunan daerah antar kabupaten/kota.

Meskipun, pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota se eks Karesidenan Kediri mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan ini, masih tetap kurang memadai dan terbilang masih relatif rendah. Hal ini terbukti dari kecilnya kontribusi PAD Kabupaten/Kota se eks Karesidenan Kediri terhadap total penerimaan daerah. Berikut data yang menunjukkan rendahnya kontribusi PAD.

Tabel 1.2
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Kediri Tahun 2016-2017

Kabupaten/Kota	2016		2017	
	Pendapatan Daerah	Kontribusi PAD	Pendapatan Daerah	Kontribusi PAD
Kab. Trenggalek	1,632,638,563,154	11%	1,791,672,372,539	14%
Kab. Tulungagung	2,570,279,524,128	13%	2,598,104,487,657	19%
Kab. Blitar	2,240,251,740,265	10%	2,307,812,881,171	13%
Kab. Kediri	2,395,721,451,016	14%	2,718,413,134,696	19%
Kab. Nganjuk	2,097,461,647,981	15%	2,300,163,558,717	14%
Kota Kediri	1,179,920,839,071	20%	1,239,131,382,633	23%
Kota Blitar	847,187,760,012	15%	850,942,358,241	22%

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, data diolah¹¹

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, kontribusi pendapatan asli daerah dari semua Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Kediri terhadap penerimaan pendapatan daerah, rata-rata masih relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya dana perimbangan dari pemerintahan pusat masih mendominasi dari total penerimaan pendapatan daerah. Dapat dikatakan bahwa Kabupaten/Kota se Eks Karesidenan Kediri belum dapat mengelola keuangan daerahnya sendiri, sehingga masih menggantungkan bantuan pada pemerintah pusat. Adanya peningkatan PAD setiap

¹¹ *Ibid.*, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, *Data Keuangan Daerah Mulai 2006*

tahunnya mencerminkan bahwa wilayah-wilayah tersebut sudah berusaha menjalankan otonomi daerahnya akan tetapi belum optimal. Sehingga besarnya pendapatan asli daerah masih relatif rendah.

Untuk melihat kemampuan sumber penerimaan daerah, menurut Halim terdapat dua jenis faktor mempengaruhinya yakni faktor yang dapat dikendalikan dan faktor yang tidak dapat dikendalikan. Faktor yang dapat dikendalikan adalah faktor kebijakan dari pemerintah itu sendiri yakni kondisi suatu daerah, peningkatan cakupan penerimaan PAD, mengadakan pembangunan baru, mencari sumber pendapatan baru, perubahan peraturan dan penyesuaian tarif. Sedangkan faktor yang tidak dapat dikendalikan adalah Perkembangan PDRB perkapita riil, jumlah penduduk dan tingkat inflasi.¹²

Wilayah Kabupaten/Kota se Eks Karsidenan Kediri memiliki ketersediaan potensi sumber daya alam yang cukup besar. Potensi tersebut seperti pertanian, peternakan, perkebunan, pertambangan dan perikanan, dimana jika terdapat suatu inovasi yang lebih baik akan mengarahkan pada pengoptimalan dan kemandirian dalam mengelola keuangan daerahnya. Hasil dari pemanfaatan potensi tersebut dengan baik akan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah yang ditandai dengan adanya pertambahan pendapatan masyarakatnya. Dimana dilihat dari kemampuan daerah dalam menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan.

Kondisi pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh di masing-masing Kabupaten/Kota se Eks Karesidenan Kediri dapat diketahui dengan indikator

¹² Abdul Halim, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2007), hal. 101

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB menurut Tarigan yaitu jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan dari seluruh aktivitas sektor-sektor ekonomi yang terdapat di wilayah itu sendiri.¹³ PDRB sangat berkaitan dengan PAD, di mana PDRB merupakan penerimaan pendapatan pemerintah yang dihasilkan dari jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Sehingga dengan adanya peningkatan PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah. Jadi dapat dikatakan PDRB merupakan fungsi dari pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk membiayai program-program pemerintah demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan berimbas pada peningkatan produktivitas.

Mengingat PDRB merupakan fungsi dari PAD, adanya peningkatan PDRB merupakan kesempatan emas bagi pemerintah daerah untuk menaikkan penerimaan PAD. PDRB juga tidak terlepas dengan adanya penduduk, di mana penduduk merupakan penggerak utama dari PDRB. Para ahli di ekonomi klasik yang dipelopori Adam Smith menganggap bahwa jumlah penduduk merupakan komponen input berpotensi yang dapat dijadikan sebagai faktor produksi dalam meningkatkan hasil output produksi suatu rumah tangga dan perusahaan. Jadi semakin banyak penduduk maka akan semakin banyak tenaga kerja yang dapat digunakan.¹⁴

Pertambahan jumlah penduduk tidak selalu menjadi masalah dan penghambat. Pertambahan penduduk yang diiringi dengan perubahan teknologi akan menambah skala produksi yang mana banyak penduduk maka akan semakin

¹³ Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal. 18

¹⁴ Makdalena F Asmuruf, dkk., "Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 15, No. 05, 2015, hal.728

banyak penduduk yang bekerja yang akan mendorong naiknya tabungan karena bertambahnya pendapatan.¹⁵ Namun peningkatan jumlah penduduk juga akan mengakibatkan perbedaan penerimaan pendapatan, sehingga pembangunan masing-masing daerah tidak sama. Jumlah penduduk yang semakin banyak dan didukung dengan daerah yang berpotensi maka akan semakin banyak pula penduduk yang akan bekerja yang secara tidak langsung akan berpengaruh pada PAD. Sehingga dapat disimpulkan semakin banyak jumlah penduduk, maka pendapatan asli daerahnya semakin meningkat dan diiringi dengan naiknya pembangunan ekonomi daerahnya.

Jawa Timur mempunyai jumlah penduduk paling banyak nomor dua setelah Jawa barat dan menjadi peringkat dua tingkat provinsi di Indonesia. Dalam Kabupaten/Kota se Eks Karesidenan Kediri selalu mengalami peningkatan jumlah penduduk secara keseluruhan akan tetapi jumlah dari masing-masing daerah berbeda. Adanya kenaikan jumlah penduduk ini mempunyai peran penting, di mana pertambahannya akan menciptakan adanya peluang usaha dan lapangan kerja sehingga penduduk turut andil dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di setiap wilayah Kabupaten/Kota masing-masing.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu bentuk dari kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Pengeluaran pemerintah ini sangat perlu dilakukan di negara berkembang untuk membangun sarana prasarana yang dapat menunjang kegiatan ekonomi masyarakat sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan naiknya perekonomian maka PDRB akan meningkat dan secara otomatis

¹⁵ Purbayu Budi Santosa dan Retno Puji Rahayu, "Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kediri", *Jurnal Dinamika Pembangunan*, Vol. 2, No. 1, Juli 2005, hal 15

akan menaikkan pula pendapatan masyarakat. Pengeluaran pemerintah daerah yang dikontrol baik akan mendatangkan penerimaan berupa pajak dan retribusi daerah. Besaran pajak dan retribusi daerah dipungut pemerintah tergantung dari kondisi wilayah tersebut yaitu tentang bagaimana potensi yang dimiliki dan juga kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Pajak dan retribusi dijadikan sebagai sumber pemasukan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya pajak dan retribusi sangat penting untuk menyokong pembangunan daerah.

Menurut prinsip Syariah, pembangunan ekonomi tidak lepas dari keadilan distribusi pendapatan, sehingga ketimpangan pendapatan tidak akan terjadi pada kehidupan umat. Masyarakat dituntut untuk menciptakan keadilan distribusi dengan menunaikan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan pajak, sehingga sumber pembiayaan tersebut dapat dioptimalkan untuk biaya pembangunan ekonomi. Seperti yang telah dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 29: ¹⁶

فَتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا
يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

“Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulullah. Dan tidak mengikuti agama yang benar (agama Allah) dari golongan orang-orang yang diberikan Kitab, sehingga mereka membayar upeti sedang mereka rendah diri”.

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa adanya perintah untuk membayar pajak sebagai upaya untuk pengoptimalan keuangan publik. Apabila masyarakat sadar akan membayar pajak, maka pembangunan ekonomi akan berjalan dengan baik,

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Hakim...*, hal. 192

sehingga distribusi pendapatan di masyarakat akan merata, sehingga kesejahteraan akan tercipta. Negara bisa menjamin masyarakatnya akan memperoleh kesempatan yang sama dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi. Dengan ini tujuan keadilan distribusi bisa terwujud agar tidak ada kekayaan yang menumpuk pada satu pihak.

Ketertarikan peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah berperan sangat penting dalam terlaksananya pembangunan daerah. Dengan adanya segala potensi wilayah yang dimiliki Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Kediri dengan diikuti perkembangan dalam mengelolanya akan memberikan wujud hasil positif dari adanya otonomi daerah. Hasil itu berupa kemampuan dalam mengelola keuangan daerahnya dengan baik, efektif dan efisien yang tercermin melalui besarnya pertumbuhan PAD. Dengan pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan secara optimal akan memberikan peluang lebih terhadap besarnya perolehan PAD melalui pajak ataupun retribusi, sehingga tidak lagi bergantung pada pemerintahan pusat.

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang dipaparkan di atas mengenai fenomena Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih rendah, maka peneliti menegaskan mengambil penelitian yang berjudul, **“Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten dan Kota Se Eks Karesidenan Kediri”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang penelitian di atas, identifikasi masalah yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya potensi daerah yang belum dimanfaatkan dengan baik menjadikan pendapatan asli daerah masing-masing wilayah masih rendah dan menciptakan ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana pemerintahan pusat.
2. Penerimaan pendapatan asli daerah yang rendah dan berbeda-beda setiap wilayah mengakibatkan pembangunan daerah belum merata dan seimbang.
3. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Kediri yang selalu mengalami peningkatan dapat memberikan gambaran terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pendapatan.
4. Kenaikan jumlah penduduk di seluruh Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Kediri akan menjadikan penggerak atau bahkan penghambat perekonomian dalam menaikkan pendapatan asli daerah yang diperoleh.
5. Pengeluaran pemerintah daerah yang ditujukan untuk pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah akan menghasilkan pajak dan retribusi daerah yang dibayarkan oleh masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai penerimaan pendapatan asli daerah yang digunakan kembali untuk pembangunan daerahnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor produk domestik regional bruto berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Kediri?

2. Apakah faktor jumlah penduduk berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Kediri?
3. Apakah faktor pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Kediri?
4. Apakah faktor pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Kediri?
5. Apakah faktor retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Kediri?
6. Apakah faktor-faktor tersebut secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Kediri?
7. Faktor manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Kediri?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh produk domestik regional bruto secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Kediri.
2. Untuk menguji pengaruh jumlah penduduk secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Kediri.
3. Untuk menguji pengaruh pengeluaran pemerintah daerah secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Kediri.
4. Untuk menguji pengaruh pajak daerah secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Kediri.

5. Untuk menguji pengaruh retribusi daerah secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Kediri.
6. Untuk menguji pengaruh dari faktor-faktor tersebut secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Kediri.
7. Untuk menentukan faktor mana yang paling dominan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Kediri.

E. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas, maka hasil yang dicapai penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat yang lebih, yaitu antara lain:

1. Manfaat Secara Teoretis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu menambah *keilmuan* pada kajian bidang pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi makro pada umumnya dan dalam ilmu ekonomi pembangunan pada khususnya.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk mempertimbangkan dalam pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang akan datang, khususnya mengenai hal-hal terkait kebijakan yang dapat meningkatkan angka pendapatan asli daerah.

- b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan sumbangsih pembendaharaan kepustakaan bagi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji dalam bidang yang sama dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Adapun ruang lingkup dan keterbatasan yang peneliti berikan dalam pembahasan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Ruang lingkup penelitian terfokus pada variabel produk domestik regional bruto, jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah daerah, pajak daerah dan retribusi daerah sebagai variabel independen dan pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen.
2. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah karena kurangnya waktu penelitian, tenaga dan data yang dibutuhkan maka lokasi dan waktu penelitian dibatasi pada wilayah 7 Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Kediri pada tahun 2010-2017, dan hasil penelitian ini tidak dapat diberlakukan pada wilayah lain.

G. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami pokok-pokok permasalahan yang ada dalam uraian berikutnya, maka peneliti akan mengemukakan terlebih dahulu definisi dari masing-masing variabel, yaitu sebagai berikut.

1. Definisi Konseptual

- a. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang memiliki tujuan guna memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali

potensi pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud dari asas desentralisasi.¹⁷

- b. Produk Domestik Regional Bruto menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah berbagai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu.¹⁸
- c. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi memiliki tujuan untuk menetap, baik penduduk usia produktif ataupun usia tidak produktif.¹⁹
- d. Pengeluaran Pemerintah daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk belanja atas barang modal, barang konsumsi dan jasa-jasa demi terlaksananya kegiatan pembangunan.²⁰
- e. Pajak Daerah, Menurut Darwin adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara

¹⁷ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal.51-52

¹⁸ Badan Pusat Statistik, *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi di Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2013-2017*, (Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur, 2018), hal. 3

¹⁹ Badan Pusat Statistik, *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2018*, (Surabaya: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2018), hal. 291

²⁰ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 168

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemampuan rakyat.²¹

- f. Retribusi Daerah, Menurut Mardiasmo adalah pungutan yang dilakukan oleh daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan bagi masyarakat luas baik orang pribadi maupun badan.²²

2. Definisi Operasional

Dari paparan definisi konseptual di atas, maka penelitian ini yang berjudul pengaruh produk domestik regional bruto, jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah daerah, pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Kediri yang mempunyai maksud untuk meneliti variabel produk domestik regional bruto, jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah daerah, pajak daerah dan retribusi daerah, apakah memberikan pengaruh terhadap pendapatan asli daerah yang terdapat di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

H. Sistematika Pembahasan Skripsi

Adapun sistematika pembahasan penelitian ini dari keseluruhan penelitian yaitu terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian.

Bagian awal memuat halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, motto, persembahan, prakata, daftar tabel, daftar gambar, daftar lambang dan singkatan, daftar lampiran, pedoman transliterasi, abstrak, dan daftar isi.

²¹ Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), hal. 68

²² Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), hal. 18

Bagian isi terdiri dari enam bab, antara lain yaitu:

- BAB I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan skripsi.
- BAB II : Landasan Teori, terdiri dari dasar teori, penelitian terdahulu sebagai pembanding, kerangka berpikir penelitian dan hipotesis penelitian. Adapun dasar teori membahas tentang teori yang digunakan, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang PDRB, jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, pajak daerah dan retribusi daerah.
- BAB III : Metode Penelitian, terdiri dari pendekatan penelitian dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data dan instrument penelitian serta teknik analisis data.
- BAB IV : Hasil Penelitian, berisi tentang deskripsi data dan pengujian hipotesis serta temuan penelitian.
- BAB V : Pembahasan, berisi tentang hasil dari jawaban hipotesis yang diteliti, dimana jumlah pembahasan harus sama dengan jumlah hipotesis.
- BAB VI : Penutup, pada bagian ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan, implikasi penelitian dan terdapat saran yang didasarkan dari hasil penelitian yang telah dikerjakan.

Bagian akhir memuat daftar rujukan, lampiran-lampiran dan riwayat hidup peneliti.